



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

SMP NEGERI 1 LARANGAN PAMEKASAN  
Jalan Raya Larangan Kec. Larangan



Nomor SOP 422/14/432.301.39/2026

Tgl. Pembuatan 30 September 2018

Tgl. Revisi 10 Januari 2026

Tgl. Pengesahan 10 Januari 2026

Disahkan Oleh Kepala Sekolah



HENDROYONO, S.Pd, M.M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731020 199802 1 001

Nama SOP

**Kegiatan Ekstra**

**Dasar Hukum**





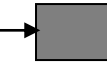


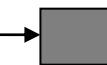




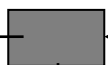



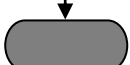
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang **Gerakan Pramuka**;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang **Penguatan Pendidikan Karakter**;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang **Standar Nasional Pendidikan**;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2008 tentang **Pembinaan Kesiswaan**;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang **Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal**;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang **Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013**;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

**Kualifikasi Pelaksana**

1. SMA
2. S1
3. S2

<p>Nomor 20 Tahun 2016 tentang <b>Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah</b></p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang <b>Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah</b></p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang <b>Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah</b></p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang <b>Standar Penilaian Pendidikan</b></p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang <b>Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah</b>;</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang <b>Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah</b>;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang <b>Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah</b>;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang <b>Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah</b>;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang <b>Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah</b>;</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Th 2014 tentang <b>Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah</b>;</p> <p>18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang <b>Penumbuhan Budi Pekerti</b>;</p> <p>19. Standar Operasional Prosedur Pembinaan Kesiswaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.</p> <p>20. SK Ekstra</p>	
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p>
<p>1. SOP Karakter 2. SOP Pelayanan Surat</p>	<p>- ATK - Komputer</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Printer</li> <li>- Meubel</li> <li>- Akses Internet</li> <li>- Sarana Publikasi</li> </ul>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<p>Apabila SOP Ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana Pelayanan Publik tidak termotivasi untuk melakukan peningkatan pelayanan</li> <li>2. Menghambat Pengembangan Minat dan Bakat Peserta Didik</li> </ol>	<p>Waka Kurikulum Waka Kesiswaan Tata Usaha</p>

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Kepala Sekolah	Komite Sekolah	Tenaga Pendidik	Tenaga Kependidikan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengadakan Rapat					- ATK - Komputer - Printer	1 Hari	Dokumen	
2	Sosialisasi Kegiatan Ekstra					- ATK - Komputer - Printer	1 Hari	Dokumen	
3	Update Data Pendaftar Peserta Kegiatan Ekstra					- ATK - Komputer - Printer	6 Hari	Dokumen	Validasi Data
4	Pengumuman Hasil Penetapan Peserta Kegiatan Ekstra					- ATK - Komputer - Printer	1 Hari	Dokumen	
5	Pengumuman Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Ekstra					- ATK - Komputer - Printer	1 Hari	Dokumen	
6	Pelaksanaan Kegiatan Ekstra					- ATK - Komputer - Printer	2 SMT	Dokumen	Evaluasi
7	Selesai					- ATK - Komputer - Printer	10 Bulan		Validasi Data Peserta



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMP NEGERI 1 LARANGAN**

Jl. Raya Larangan Kab. Pamekasan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
KEGIATAN EKSTRA**